

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berakhirnya perang dingin pada tahun 1980-1990 telah memberikan pengaruh besar terhadap studi Hubungan Internasional. Kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet juga menandakan kemenangan paham Liberalisme atas Sosialisme. Runtuhnya tembok Berlin dan terpecah-belahnya Uni Soviet, seakan-akan membenarkan semua strategi dan kebijakan negara-negara Barat. Ideologi, politik, ekonomi dan kebijakan keamanan Barat adalah rujukan dan arah yang harus ditempuh oleh negara-negara berkembang jika mereka ingin maju¹. Akibatnya, pemikiran dan teori ilmu Hubungan Internasional yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa nyata yang telah terjadi sebelumnya mengalami pergeseran yang besar. Bila pada masa perang dingin studi dipusatkan pada masalah-masalah yang bersifat makro politik, maka pada masa kini studi Hubungan Internasional berfokus pada kajian-kajian yang lebih memperhitungkan rincian-rincian sub-nasional yang berdimensi politik, ekonomi maupun keamanan².

Juwono Sudarsono dalam artikel "*State of the Art* Hubungan Internasional: Mengkaji ulang Teori Hubungan Internasional" menyatakan bahwa perkembangan sejarah dunia selamanya membuktikan bahwa dominasi sebuah negara adidaya tidak akan dapat bertahan lebih dari 50 tahun. Apapun yang dilakukan negara adidaya tersebut, secara mutlak akan muncul satu atau dua kekuatan ekonomi baru yang perlahan tetapi pasti mulai menggeser kedudukan adidaya tunggal. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pada masa kini, kekuatan militer dan politik sebuah negara bukanlah penentu utama keberlangsungan kepemimpinan sebuah negara (hegemoni) di dunia. Munculnya

¹ Sudarsono, Juwono. Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan tantangannya. Pustaka Jaya. 1996

² Ibid

negara-negara dengan kekuatan ekonomi baru secara nisbi akan mengurangi bobot dan pengaruh politik dan militer suatu negara terhadap negara lainnya.

Meskipun hingga kini Amerika Serikat tetap di pandang sebagai sebuah negara besar di dunia, namun kemunculan China dan India sebagai dua negara yang dijuluki keajaiban dari timur, secara masiv mampu terus bertumbuh dan memberikan kontribusi yang nyata dalam perkembangan perekonomian dunia. China dan India merupakan negara yang tidak dapat dipandang sebelah mata bukan karena kekuatan angkatan bersenjatanya, namun karena kekuatan ekonomi dan teknologi informasi yang dimiliki kedua negara masing-masing.

Khusus bagi China, sebagai sebuah negara yang tumbuh dengan kekuatan ekonomi mencengangkan di dunia, China telah lama menyadari arti penting *soft power* sebagai strategi politik internasional negara. Di negaranya, *soft power* menjadi salah satu istilah yang sangat umum digunakan di antara para pemimpin politik, pimpinan akademi dan para jurnalis³. Pada tingkat internasional, *soft power* China sendiri juga sering menjadi isu utama.

Pada tahun 2007, Forum Ekonomi Dunia yang diselenggarakan di Dalian (Propinsi Liaoning, China) mencatatkan *soft power* China sebagai salah satu isu utama. Pemimpin Partai Buruh Australia pada saat itu, Kevin Rudd, bahkan mengangkat sebuah buku yang ditulis oleh Joshua Kurlantzick's untuk mengingatkan mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush tentang "bagaimana Amerika Serikat kehilangan pengaruhnya"⁴.

Congressional Research Service (CRS) pada 4 Januari 2008 juga merilis sebuah laporan yang komprehensif mengenai pengaruh *soft power* China di Asia Tenggara terhadap Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut dituliskan bahwa dalam kurun waktu 15-20 tahun, China akan menjadi pemimpin di wilayah regional Asia Tenggara. Dan hal ini merupakan konsekuensi dari pengembangan *soft power* China dan penolakan dari pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut⁵.

³ Li, Minjiang. *Soft power: Nurture not nature*. Maryland. 2009 hal 1

⁴ Joshua Kurlantzick's dalam *Charm Offensive: How China's Soft power is Transforming the World* menyatakan bahwa sejak tahun 1997, China telah menggunakan *soft power* di Asia Tenggara dan meningkatkan kemampuannya untuk memengaruhi negara-negara di Asia Tenggara melalui persuasi, bukan melalui koersi (hal 270-276).

⁵ Thomas Lum, Wayne M. Morrison, dan Bruce Vaughn (para ahli Hubungan Asia dari Divisi Foreign Affairs, Defense, and Trade)

Dari sisi pemimpin Pemerintah China, Sekretaris Jendral Partai Komunis China yang juga menjabat sebagai Presiden Republik Rakyat China saat ini, Hu Jintao, menegaskan dalam Rapat Pimpinan Pusat Hubungan Luar Negeri China pada 4 Januari 2006 bahwa peningkatan status internasional dan pengaruh China didasarkan pada kedua *power*, yaitu: *hard power* (ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, pertahanan) dan *soft power* (kebudayaan). Lebih lanjut, dalam laporan politik Kongres Partai ke-17, Hu Jintao secara tegas menyatakan :

当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要原因，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化生活权益得到更好保障，是社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。——中国共产党十七大报告⁶

Dewasa ini, budaya semakin menjadi sumber penting penyatu dan pembentuk masyarakat, budaya juga menjadi alasan utama negara menolak peperangan. Budaya yang kaya dan hangat telah menjadi harapan masyarakat. Guna terus memajukan paham Sosialisme, terlebih dahulu harus mengedepankan budaya. Budaya mengarahkan Sosialisme menuju pencapaian baru, menstimulasi seluruh budaya rakyat menumbuhkan semangat hidup, meningkatkan *soft power* negara, menjadikan dasar kehidupan berbudaya bangsa lebih terjamin, kaya dan berwarna, serta meningkatkan semangat kehidupan bermasyarakat. — Laporan Kongres Partai ke-17

Hal ini ditindaklanjuti pada bulan September 2006, untuk pertama kali dalam sejarah Partai Komunis China (PKC), pengembangan budaya ditetapkan sebagai suatu program nasional dalam Rencana Lima Tahun ke-11 untuk periode 2006-2010⁷. Bahkan, Zhao Qizheng, kepala Kantor Informasi dalam Dewan Negara, yang terkenal sebagai *image maker* China memosisikan budaya China sebagai senjata ampuh untuk melawan sikap agresif dunia barat⁸.

⁶ Zhongguo Weilai Zouxiang. Renmin Chubanshe: Beijing, 2009.

⁷ Dikutip dari artikel Natalia Soebagio dalam Merangkul China halaman 105.

⁸ Soebagio, Natalia. Merangkul China. 2009. Hal 104

Perdana Menteri Wen Jiabao dalam laporan kerja untuk pemerintah turut menyatakan hal senada dengan meletakkan promosi perkembangan sosial, reformasi pemerintah, kedamaian dunia dan harmonis sebagai agenda utama pada tahun 2007 selain target pertumbuhan ekonomi dan militer. Deputi Kongres Nasional Rakyat (National People's Congress) Peng Fuchun juga menyatakan bahwa pengembangan *soft power* kebudayaan sebaiknya tidak dipandang sebelah mata, melainkan harus disetarakan dengan salah satu sisi dari keajaiban China di tatanan dunia internasional selain keajaiban pertumbuhannya⁹.

Yu Guoming, Profesor China's People University (中国人民大学) menyatakan: "Keberhasilan sebuah negara berdasarkan dua jenis power, yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* sering ditunjukkan melalui GDP dan aset negara secara riil, namun budaya, struktur dan sistem informasi adalah bagian dari *soft power*."¹⁰

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kebudayaan dan *soft power* China di bidang budaya akan menjadi titik penting dari perhatian China dewasa ini. Mengembangkan *soft power* di bidang kebudayaan, merupakan target utama yang menguntungkan tidak hanya bagi domestik negara tersebut, namun juga menguntungkan China secara internasional.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia tidak luput sebagai salah satu negara tujuan penggunaan *soft power* China. Indonesia di tengah ASEAN pada tahun 1980-an dipandang sebagai negara yang mempunyai peran kunci¹¹. Dalam memoar Qian Qichen, mantan Menteri Luar Negeri Cina, tercatat bahwa sesungguhnya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara sangat tergantung pada perkembangan hubungan antara Indonesia dan China¹². Terlebih Cina sangat membutuhkan lingkungan internasional yang sangat bersahabat selama reformasi (改革开放) yang mulai diadakan China pada tahun 1978.

Kedua bangsa pertama kalinya mengadakan kontak pada abad pertama masehi ketika para pedagang dari China untuk pertama kalinya tiba di tanah

⁹ Li Baojie, Cheng Yifeng, Wang Mian dalam artikel *soft power, a new focus at China's "two session"*

¹⁰ Zhongguo Weilai Zouxian. Renmin Chubanshe: Beijing, 2009.

¹¹ Tuty Enoch Muas, "Hubungan Indonesia-Cina: Secara Historis, Dinamis!" dlm. Merangkul China. Gramedia. 2009. Hal 34

¹² Qian Qichen, "Ten Episodes in China's Diplomacy" dlm, Tuty Enoch Muas, "Hubungan Indonesia-Cina: Secara Historis, Dinamis!" dlm. Merangkul China. Gramedia. 2009. Hal 35

Nusantara. Ketika itu, hubungan antara Indonesia dan China masih terbatas pada duta dagang yang rajin berlayar dan bertukar barang dengan penduduk lokal. Di beberapa pelabuhan tertentu, sambil menunggu angin yang akan membawa kapal mereka kembali ke kampung halaman, para pedagang ini menetap beberapa lama, mendirikan gudang dan rumah ibadah¹³. Inilah awal mula interaksi antara China dengan sebuah negeri baru yang kelak dinamakan Indonesia.

Kong Yuanzhi, Guru Besar Bahasa dan Kebudayaan Indonesia Universitas Beijing, menyatakan bahwa hubungan persahabatan antara kedua rakyat, China dan Indonesia, dapat ditelusuri secara surut hingga sekitar 2.000 tahun yang lalu¹⁴. Ban Gu, sejarawan Dinasti Han Timur China bahkan menguraikan catatan penting berisi catatan perjalanan para pedagang ke selatan. Dalam catatan ini ditemukan pertama kali Indonesia dan China mengadakan kontak dagang.

Para peneliti umumnya berpendapat bahwa para saudagar Tiongkok Dinasti Han berangkat dari Xuwen (sekarang Guangdong) dan Hepu (sekarang Guangxi) untuk berlayar ke India dengan melewati Selat Malaka. Ketika melalui Selat Malaka, mereka mengadakan transaksi dengan penduduk Indonesia di sebelah pantai Selat Malaka. Kitab sejarah *Zhu Fan Zhi* bahkan mencatat sebuah tempat di pantai timur Sumatra bernama "Jianbi" yang menghasilkan mutiara-mutiara terbaik¹⁵.

Penemuan arkeologi berupa patung ukiran, porselen, dan sendok naga berlapis hijau tipis dari zaman Dinasti Han Barat di perairan Sumatra, Jawa dan Kalimantan; tergalinya mata uang kuno China sebelum Masehi di dekat Yogyakarta dan lain sebagainya, dapat dijadikan bukti hubungan ekonomi dan kebudayaan antara China dan Indonesia jauh pada 2.000 tahun yang lalu.

Fa Xian seorang biksu senior masa Dinasti Jin Timur yang berangkat ke India untuk belajar Budhisme, dalam perjalanan pulang ke China pernah terhanyut dan berlabuh di pulau Jawa pada tahun 411 Masehi. Fa Xian dalam kitab sejarah China tercatat sebagai orang China paling awal yang mengunjungi Indonesia.

¹³ Sulhi Muhammad. "Merekonstruksi Masa Lalu, Mungkinkah?" dalam Etnik Tionghoa di Indonesia. Jakarta. Gramedia. 2006.

¹⁴ Kong Yuanzhi. Silang Budaya Tiongkok Indonesia. Jakarta. Bhuana Ilmu Populer. 2005.

¹⁵ Jianbi ditengarai sebagai Jambi, sebuah tempat yang dikenal dunia saat itu sebagai penghasil mutiara-mutiara terbaik.

Pada masa Dinasti Tang, Sriwijaya pernah mengirim utusan membawa rombongan tari dan nyanyi mengunjungi China. Pada masa ini pula banyak biksu yang hendak menekuni ajaran Budha ke India, terlebih dulu singgah ke Jawa¹⁶ dan Sriwijaya untuk meneliti agama Budha di kedua tempat tersebut. Yi Jing, seorang Biksu Senior China pada saat itu memperkenalkan keadaan alam dan adat-istiadat Swriwijaya dalam tulisannya yang berjudul *Da Tang Xiyu Qiufo Gaoshen Zhuan (Kisah Biksu Senior Tang Raya Mengejar BUDhisme di Tanah Barat)* dan *Nanghai Jigui Neifa Zhuan (Jisah Penelitian Budhisme di Laut Selatan)*.

Zheng He dari Dinasti Ming (lebih dikenal dengan laksamana Cheng Ho di Indonesia) memimpin barisan kapal berlayar ke Samudra Barat sebanyak tujuh kali antara tahun 1405-1433, dan hampir setiap kali dari perjalanannya singgah ke Jawa, Sumatra dan pulau lainnya untuk mengadakan kunjungan persahaabatan dan kegiatan perdagangan. Dinasti Ming dan Jawa memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak kurang dari 20 kali tercatat kunjungan dari utusan Jawa ke China pada 100 tahun awal berdrinya dinasti tersebut. Hingga detik ini, kunjungan Zheng He ke Indonesia tetap diingat dan menjadi catatan sejarah penting bagi hubungan kedua negara.

Sekalipun pada akhir abad ke-15, hubungan persahabatan kedua negara terus mengalami gangguan dan sabotase dari kaum kolonial, akan tetapi rakyat kedua negara merasa senasib sepenanggungan, saling mendukung dan bersimpati satu sama lain. Pada 1 Oktober 1949, setelah melalui perang saudara yang panjang, Republik Rakyat China secara resmi diproklamirkan pada dunia internasional. Sekalipun China pada saat itu mengambil kebijakan *yi bian dao* atau “condong ke satu sisi”¹⁷, akan tetapi hal ini tidak merubah keeratan hubungan kedua negara. 15 Januari 1950 menjadi catatan penting kedua negara dimana

¹⁶ Tempat yang dikunjungi dan dianggap pusat agama Budha di Jawa saat itu terletak di Kerajaan Koring.

¹⁷ Muas, Tuty Enoch. “Hubungan Indonesia-China: Secara Historis, Dinamis!” Dalam Merangkul China. Jakarta. Gramedia. 2009

Moh. Hatta yang ketika itu menjabat sebagai Perdana Menteri¹⁸, menyatakan secara resmi pengakuan Indonesia akan kedaulatan China sebagai sebuah negara.

13 April 1950, China dan Indonesia secara resmi membangun hubungan diplomatik antar dua negara. Juli 1950, China secara resmi membuka kantor perwakilan di Indonesia dengan mengirimkan duta besar Wang Renshu. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pengiriman Arnold Mononutu sebagai duta besar Republik Indonesia ke Beijing. Hubungan kedua negara mulai bertambah erat. Tahun 1953 tercatat sebagai tahun dimana China dan Indonesia pertama kali menandatangani perjanjian bilateral dua negara.

Setelahnya, hubungan dagang antara kedua negara mengalami peningkatan. Total nilai perdagangan meningkat dari AS\$ 7.38 miliar di tahun 1954 menjadi AS\$ 129 miliar di tahun 1959. Bahkan di tahun 1965, China menjadi rekan dagang kedua Indonesia dimana nilai ekspor dan impor China ke Indonesia dapat mencapai sebelas persen dari total ekspor impor Indonesia.

Tabel 1.1
Perdagangan China-Indonesia periode 1950-1966
(Unit dalam AS\$10.000)

Year	1950—1955	1956—1960	1961—1965	1966
Export	11.75	206.28	236.99	0.33
Import	22.56	191.98	225.20	16.39
Total	34.31	398.26	462.19	16.72

Sumber : Kalender Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri China tahun 1884¹⁹.

¹⁸ Ketika China memproklamasikan pendirian negaranya, Indonesia masih berada dalam upaya mengonsolidasikan diri. Pada saat itu, Indonesia sedang menjadi negara federal di bawah nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Soekarno sebagai Presiden. Akan tetapi, pengakuan Indonesia ini tidak serta merta disambut gembira oleh China. Pada masa itu, di Indonesia masih ada perwakilan Republik China (Taiwan). Setelah ada kepastian ditutupnya semua konsulat Republik China di Indonesia, barulah pada tanggal 28 Maret 1950, Republik Rakyat China menyatakan pengakuannya terhadap Republik Indonesia.

¹⁹ Tidak ada data resmi mengenai hubungan ekonomi China-Indonesia selama tahun 1967-1976.

Di bidang kebudayaan, pada Januari 1956, Lembaga Persahabatan Indonesia-China didirikan di Jakarta dengan Prof. Prijono²⁰ sebagai ketuanya dan pada tanggal 1 Juni 1955, bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo ke China, Lembaga Persahabatan China-Indonesia didirikan di Beijing dengan Haji Burhat menjabat sebagai ketua. Selama periode 1955-1965 kedua lembaga persahabatan secara aktif telah banyak melaksanakan kegiatan yang memperkuat hubungan rakyat kedua negara, antara lain dengan pertukaran pengiriman pelajar dan mahasiswa. Pada tahun 1957 Lembaga Persahabatan Indonesia-China tercatat telah mengirimkan 10 mahasiswa untuk menuntut ilmu di berbagai universitas di Beijing dan pada 1 April 1961, kedua negara menandatangani persetujuan kerjasama Budaya.

Kehadiran China pada Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada bulan April 1955 mencatatkan cerita tersendiri bagi sejarah dunia. China yang diwakili Zhou Enlai, mengajukan tujuh prinsip yang akan diacu dalam menjalin hubungan dengan negara-negara Asia dan Afrika²¹. China dan tuan rumah Konferensi, Indonesia telah memberikan sumbangan penting bersama dalam merumuskan Dasasila Bandung yang berperan penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Konferensi.

Pada Konferensi ini pula, Indonesia dan China menandatangani perjanjian dwikewarganegaraan²². Pola perjanjian dwi kewarganegaraan ini dianggap sebagai

²⁰ Profesor Prijono adalah Pemenang Hadiah internasional Stalin dengan karya “Memperkuat Perdamaian Internasional”.

²¹ Tujuh Prinsip tersebut adalah (1) prinsip saling menghargai kedaulatan, (2) tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, (3) tidak saling ancam atau agresi, (4) mengakui persamaan antar ras, (5) persamaan antar bangsa, (6) menghargai hal masing-masing untuk memilih system politik dan ekonominya, (7) saling menguntungkan dalam hubungan ekonomi dan budaya. Ketujuh Prinsip ini terakomodasi dalam rumusan lima prinsip yang dijadikan pedoman dasar hubungan antar bangsa. Lih. Merangkul Cina, hlm. 28.

²² Perjanjian ini mengizinkan kaum Tionghoa untuk memilih menjadi warga RI atau China dalam jangka waktu dua tahun. Perjanjian ini sangat penting karena untuk pertama kalinya kaum Tionghoa mempunyai hak untuk memiliki kewarganegaraan non-China. Sejak Dinasti Qing (1644-1911) semua orang yang berdarah China oleh pemerintah China dianggap sebagai warga negaranya (asas *ius sanguinis*).

salah satu solusi tepat dalam menyelesaikan ketegangan akibat kewarganegaraan ganda yang tidak diakui di Indonesia.

Hubungan Indonesia-China sempat terganggu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 10 tahun 1959 (PP10) oleh pemerintah Indonesia yang melarang warga asing untuk berdagang eceran. Tujuan utama Pemerintah Indonesia adalah untuk melindungi pengusaha lokal. Akan tetapi pada penerapannya, PP tersebut dibarengi dengan pemaksaan dan pelarangan bagi warga asing untuk tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusuhan anti asing, khususnya anti Tionghoa. Kejadian ini menyebabkan Pemerintah China mengajukan protes dan memulangkan warganya ke China. Jumlahnya diprediksi mencapai seratus ribu orang lebih²³.

Dalam kurun waktu tahun 1960 hingga 1963 tercatat beberapa kali kerusuhan anti Tionghoa, namun hal ini tidak sampai mempengaruhi hubungan China-Indonesia secara berlarut-larut. China menjunjung tinggi prinsip hubungan luar negeri mereka yang tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Sikap yang sama diberikan China pada Indonesia dalam upaya mengembalikan Irian Barat pada tahun 1963 ke tangan Indonesia dan ketika Indonesia memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962²⁴.

Kedekatan hubungan Indonesia dengan China mengalami puncaknya ketika pada awal tahun 1960-an tercipta poros Jakarta-Peking yang berkembang menjadi poros Jakarta-Peking-Pyongyang. Poros ini dimaksud untuk mematahkan "*old established forces*" dan menggalang "*new emerging forces*". Karena itu China kemudian memuji sikap Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bentuk protes terhadap terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

²³ Charles A. Coppel dalam Tionghoa Indonesia dalam Krisis.

²⁴ Hal ini selaras dengan tujuan kebijakan luar negeri China, yaitu mendukung tercapainya perdamaian, pembangunan bersama, dan keharmonisan hidup bangsa-bangsa di dunia.

China juga mendukung Indonesia dalam pendirian CONEFO²⁵ pada tahun 1965 sebagai tandingan terhadap PBB. Demikian juga China mendukung penuh Indonesia dalam penyelenggaraan GANEFO²⁶ pada tahun 1963 untuk menandingi pesta olahraga olimpiade. Sebaliknya, Indonesia juga mendukung China dengan memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan China untuk merebut kedudukan Republik China (Taiwan) di PBB.

Akan tetapi hubungan erat China dan Indonesia tidak bertahan lama. China diyakini memberikan dukungan pada PKI sekaitan dengan kudeta G30S yang ditengarai sebagai upaya untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah. Kudeta ini tidak menghantarkan PKI sebagai penguasa di Indonesia, tapi telah membawa rusaknya hubungan baik Indonesia-China yang berujung pada pembekuan hubungan diplomatik dua negara pada bulan Oktober 1967.

Sejak putusnya hubungan kedua negara, baik Indonesia maupun China masing-masing tenggelam dalam persoalan dalam negeri masing-masing. Pada tahun 1966, Mao Zedong dan Tentara Merah menjalankan “Revolusi Kebudayaan” yang berpegangan pada ideologi komunis yang radikal yang menentang setiap gerakan kapitalisme sekecil apapun. Di Indonesia sendiri, Soeharto menentang semua kebijakan Soekarno yang memberikan tempat bagi komunisme, membuang dan memasmi semua pengikut PKI serta menjadikan pembangunan ekonomi dan politik sebagai prioritas utama. Kedua negarapun disibukkan dengan urusan dalam negeri masing-masing.

Tabel 1.2

²⁵ CONEFO = Conference of The New Emerging Forces. Soekarno mendirikan CONEFO untuk menggalang negara-negara yang tidak mau terlibat konflik antara dua kubu, timur dan barat, Komunis dan Kaputalis.

Dalam artikel “Hubungan Indonesia-China di Era Pasca Orde Baru: Perspektif Indonesia”, dalam buku “Merangkul Cina”, Syamsul Hadi menuliskan bahwa CONEFO diharapkan menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi negara-negara miskin karena pada saat itu Cina belum menjadi anggota PBB dan Indonesia baru saja keluar dari organisasi dunia tersebut.

²⁶ GANEFO = Games of the New Emerging Forces. Tercatat 51 negara ikut ambil bagian dalam pesta olahraga ini. Lih Merangkul Cina. Hlm. 31.

Perdagangan Tidak Langsung China-Indonesia via Hongkong
Periode 1967-1984 (Unit : miliar dolar Amerika)

Year	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Import	8	28	45	33	42	34	—	—
Export	94	134	203	238	256	227	195	165
Total	102	162	248	271	298	261	195	165

Sumber : Perdagangan Asing Hongkong tahun 1978, 1979, 1980, 1982, 1984, 1985.

Hal ini berdampak besar bagi hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara. Hubungan perdagangan langsung di antara Indonesia dan China terputus dan dialihkan menjadi perdagangan tidak langsung melalui Hongkong dan Singapura²⁷. Pada tahun 1970-an, sekitar 30 persen dari impor barang Indonesia dari Hongkong dibuat di China dan sekitar 14 persen ekspor Indonesia ke Hongkong dijual ke China pada saat yang bersamaan.

Setelah dilaksanakan Sidang Pleno II dan Kongres XI pada tahun 1978, Partai Komunis China memutuskan untuk melaksanakan politik reformasi dan keterbukaan (*gaige kaifang*) yang berfokus pada bidang ekonomi. Ribuan zona khusus dalam berbagai level baik di tingkat nasional maupun sub-nasional dibentuk. Pengembangan zona ekonomi khusus ini merupakan strategi yang dipelajari China dari negara-negara tetangganya seperti Hong Kong (saat itu Hongkong masih berada di bawah pemerintahan Inggris), Taiwan, Korea Selatan dan Singapura yang dijuluki “macan asia” dan dianggap sukses membangun perekonomian dengan memanfaatkan pembagian kerja internasional baru yang muncul pada tahun 1970-an²⁸. Sejak itu, dalam waktu beberapa tahun saja, pencapaian kemajuan China berhasil menarik perhatian seluruh dunia.

²⁷ Lin Mei dalam artikel “*The Economic Realitions Between China and Indonesia and Mainland China’s Investments in Indonesia*”.2005

²⁸ Dikutip dari tulisan Syamsul Hadi, “Strategi Pembangunan Mahatir dan Soeharto” dalam buku *Zona Ekonomi Khusus*.Hlm. 3.

Dalam bidang politik sendiri, pada tahun 1970-an, China yang menerapkan "diplomasi revolusioner"²⁹ mengharuskan negara tersebut untuk mengambil manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya dari kondisi internasional saat itu. Salah satu implementasi diplomasi tersebut adalah dengan dimulainya pendekatan China ke Amerika, sehingga terjadi kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Henry Kissinger ke China pada bulan Juli 1971. Langkah ini kemudian diikuti oleh kunjungan Presiden Nixon pada tahun 1972 dan menghasilkan kesepakatan di antara kedua negara yang tercantum di dalam komunike Shanghai. Pada saat inilah, China mulai memperbaiki hubungannya dengan berbagai negara dalam berbagai bidang, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, Indonesia sejak tahun 1980-an juga terus mengadakan perbaikan di bidang struktur ekonomi dan mencapai hasil yang menonjol. Kedua negara sama-sama menyadari bahwa mempercepat pembangunan ekonomi dan memperbaiki kehidupan rakyat merupakan tugas bersama yang dihadapi kedua negara. Memperbaiki hubungan kedua negara, tidak saja menguntungkan perkembangan ekonomi masing-masing, tapi juga menguntungkan perdamaian, kestabilan dan perkembangan Asia serta dunia pada umumnya.

Sejak tahun 1978, intensitas hubungan kedua negara berangsur-angsur meningkat. April 1985, Wu Xueqian, anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China memimpin delegasi dari China datang mengunjungi Indonesia dan menghadiri kegiatan peringatan ulang tahun ke-30 Konferensi Asia Afrika di Bandung. Selama berada di Indonesia, Wu Xueqian dan Menlu Indonesia saat itu, Muchtar Kusumaatmadja telah mengadakan tukar pikiran mengenai masalah pemulihan perdagangan langsung antara kedua negara dan masalah-masalah lain yang menjadi perhatian bersama.

Pada tanggal 5 Juli 1985, Sukamdani S. Gitosardjono, ketua Umum KADIN dan Wang Yaoting, Ketua Dewan Promosi Perdagangan Internasional China, menandatangani Memorandum Kesepakatan mengenai Perdagangan Lang-

²⁹ Diplomasi Revolusioner ditetapkan Mao Zedong berdasarkan asumsi bahwa dengan membiarkan konflik antara Amerika-Soviet semakin meruncing, membiarkan konflik antara Amerika-negara-negara Asia meruncing, mencegah penyebaran pengaruh Soviet, dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk membebaskan Taiwan. Lih. Merangkul China. hlm. 32.

sung Kedua Negara di Singapura. Hal ini menandakan bahwa hubungan kedua negara mulai memasuki tahap baru, terutama di bidang Perdagangan. Catatan Statistik tahun 1988 bahkan menunjukkan peningkatan kegiatan ekspor-impor di antara kedua negara, sekitar tiga kali lipat dibandingkan tahun 1985³⁰.

Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 1989, Menteri Luar Negeri China, Qian Qichen mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Soeharto dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia Moerdiono dan mencapai persetujuan mengenai normalisasi hubungan kedua negara. Untuk menindaklanjuti kesepakatan ini, pada tanggal 1 hingga 4 Juli 1990, Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, Ali Alatas, berkunjung ke China. Menteri Luar Negeri kedua negara menandatangani persetujuan tentang penyelesaian masalah utang Indonesia pada China dan komunikasi tentang pemulihan hubungan diplomatik kedua negara. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa hubungan diplomatik kedua negara akan dipulihkan mulai tanggal 8 Agustus 1990³¹.

Secara resmi hubungan diplomatik Indonesia dengan China pulih sejak ditandatanganinya memorandum kesepakatan mengenai pemulihan hubungan diplomatik. Pemerintah China diwakili oleh Perdana Menteri China saat itu, Li Peng. Kedua negara juga menandatangani persetujuan perdagangan, dan memutuskan saling memberikan perlakuan negara yang paling menguntungkan (*most favored nation treatment*).

Bulan November 1994, Presiden Jiang Zemin datang ke Jakarta menghadiri pertemuan tidak resmi para pemimpin anggota-anggota APEC II. Usai pertemuan tersebut, beliau memenuhi undangan untuk mengadakan kunjungan kenegaraan dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Pada tanggal 8 November, pemerintah kedua negara sepakat untuk menandatangani persetujuan mempromosikan dan melindungi penanaman modal antara kedua negara. Kedua Presiden kedua negara menghadiri upacara penandatanganan tersebut.

³⁰ Disadur dari tulisan Leo Suryadinata dalam "Politik Luar Negeri Indonesia di bawah Soeharto". Lih Merangkul China. hlm 33.

³¹ Merujuk pada tulisan Kong Yuanzhi: "Hubungan persahabatan, kerjasama dan pertukaran budaya China-Indonesia selama belasan tahun terakhir." Dimuat dalam buku Silang Budaya Tiongkok-Indonesia. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2005.

Angkatan bersenjata kedua negara juga telah menjalin hubungan persahabatan. Panglima ABRI Jendral Try Sutrisno pada tahun 1992, memimpin delegasi ABRI untuk mengunjungi China. Pada Januari 1994, pemimpin Tentara Pembebasan Rakyat China, Jendral Liu Huaqing juga memimpin delegasi untuk mengunjungi Indonesia.

Sejak dipulihkannya hubungan diplomatik hingga April 1994, sebanyak 120 rombongan tingkat Wakil Menteri ke atas dari kedua belah pihak telah mengadakan kunjungan timbal balik, diantaranya dari pihak China sebanyak 74 delegasi dan dari pihak Indonesia sebanyak 46 delegasi. Kedua negara juga telah menjalin sistem konsultasi pejabat tinggi departemen luar negeri³².

Kedua negara juga memiliki pendirian yang sama dan saling mendukung dalam banyak masalah besar internasional. Pada April 1994, Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan kepada Pemerintah China bahwa Pemerintah Indonesia setuju dalam dokumen resmi Bahasa Indonesia untuk mengubah sebutan nama “Cina” menjadi “Tiongkok”³³.

Ketika pada tahun 1998, Presiden Habibie melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Jiang Zemin di Kuala Lumpur, kedua pimpinan negara sepakat bahwa kedua negara seharusnya meningkatkan hubungan kemitraan, kerukunan dan persahabatan³⁴. Karenanya, pada kunjungan Presiden Aburrahman Wahid ke China di tahun 1999, diperoleh kesepakatan antara dua Kepala Negara untuk membangun kerja sama menyeluruh yang stabil, bertetangga baik dan saling percaya dalam jangka panjang.

Tabel 1.3

³² Kong Yuanzhi. *Silang Budaya Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2005

³³ Kong Yuanzhi dalam *Silang Budaya Tionghoa Indonesia*. Lih, keterangan poin 2. Hlm. 501-502.

³⁴ Pada 17 November 1998, di sela-sela pertemuan APEC di Kuala Lumpur, Presiden Habibie dan Presiden Jiang Zemin bertemu dan melakukan pembicaraan tentang peristiwa Mei dan Krisis Keuangan Asia Tenggara.

Keseimbangan Perdagangan antara China dan Indonesia
Selama 1985-2003 (Unit : miliar dolar Amerika)

Tahun	Statistik Indonesia			Statistik China		
	Total	Ekspor	Impor	Total	Ekspor	Impor
1985	333.1	84.2	248.9	108.7	69.0	39.7
1986	476.1	139.0	337.1	285.0	102.2	182.8
1987	751.0	343.0	408.0	432.2	142.1	290.1
1988	930.5	491.8	438.7	522.7	170.4	352.3
1989	1,095.9	568.5	527.4	441.9	141.9	300.0
1990	1,486.8	834.4	652.4	545.7	220.0	325.7
1991	2,025.9	1,190.9	835.0	1,884.5	481.1	1,403.4
1992	2,147.9	1,396.4	751.5	2,025.7	471.4	1,554.3
1993	2,114.0	1,250.0	864.0	2,160.3	691.7	1,468.6
1994	2,690.7	1,321.7	1,369.0	2,640.1	1,051.7	1,588.4
1995	3,137.0	1,641.8	1,495.2	3,490.2	1,438.2	2,052.0
1996	3,655.1	2,057.5	1,597.6	3,708.4	1,428.0	2,280.4
1997	3,747.3	2,229.3	1,518.0	4,514.2	1,840.6	2,673.6
1998	2,738.2	1,832.0	906.2	3,627.9	1,171.2	2,456.7
1999	3,251.1	2,008.9	1,242.2	4,829.8	1,778.9	3,050.9
2000	4,789.6	2,767.7	2,021.9	7,463.9	3,061.9	4,402.0
2001	4,043.4	2,200.7	1,842.7	6,724.6	2,836.5	3,888.1
2002	5,330	2,903	2,427	7,928.3	3,426.9	4,501.4
2003	6,760	3,803	2,957	10,229	4,481.0	5,748.0

Sumber : Kalender Hubungan Ekonomi dan Perdagangan Asing China dari Biro Pusat Statistik (BPS)

Sejak terjadinya kembali kontak dagang kedua negara, dalam bagan di atas dapat dilihat bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan China selalu meningkat tajam sejak tahun 1985, kecuali pada tahun 1998 dan 2001. Menurut data statistik China, nilai perdagangan China dan Indonesia meningkat seratus kali lipat dari AS\$ 108.7 juta pada tahun 1985 menjadi AS\$ 10.2 miliar pada tahun 2003.

Menurut catatan Departemen Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan surplus bagi Indonesia sebesar AS\$ 420,91 juta pada tahun 2002³⁵, sedangkan pangsa dari total impor China turun dari 1,74% menjadi 1,56%. Total perdagangan Cina dengan Indonesia pada periode Januari-Juni 2002 mencapai AS\$ 3.595,47 juta, atau naik 5,35% dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Ekspor Cina ke Indonesia mencapai AS\$ 1.587,28 juta, atau naik 14,13%. Sebaliknya impor dari Indonesia turun sebesar 0,69% yakni dari AS\$ 2.022,14 juta menjadi AS\$ 2.008,19 juta yang terdiri dari impor migas turun 4,17% menjadi AS\$ 379,85 juta dan impor non-migas naik 0,16% menjadi US\$ 1.628,34 juta³⁶.

Secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan perdagangan Indonesia-China pada periode 2003-2005 berkisar AS\$31 atau setara 64 miliar rupiah³⁷. Jumlah ini masih di dominasi oleh nilai ekspor migas Indonesia ke China yang memang menjadi ciri khas dan kekuatan perdagangan Indonesia yang utama.

Meskipun hubungan dengan China pulih kembali pada tahun 1990, akan tetapi selama dekade 90-an, Indonesia masih menunjukkan sikap keraguan dan kecurigaan tentang ambisi China di kawasan Asia Timur, khususnya Laut Cina Selatan. Hal ini dibuktikan dari dukungan Indonesia pada keterlibatan Amerika Serikat dalam ARF dan perjanjian keamanan dengan Australia tahun 1995. Untuk mengurangi keraguan Indonesia, China menggunakan pendekatan baru, yaitu meningkatkan *charm offensive*, suatu gerakan tebar pesona, wujud dari upaya Cina untuk menunjukkan *soft power* terhadap Indonesia³⁸.

Salah satu bentuk nyata penggunaan *charm offensive* ini adalah keputusan China untuk tidak melakukan devaluasi mata uangnya pada krisis finansial Asia di akhir tahun 1997. Alasan utamanya adalah devaluasi akan semakin menjatuhkan nilai mata uang negara-negara Asia yang terkena krisis. Keputusan ini merupakan

³⁵ Laporan Atase Depperindag KBRI Beijing, RRC, Agustus 2002. Neraca perdagangan antara Cina dan Indonesia selama ini selalu surplus bagi Indonesia.

³⁶ Laporan Atase Depperindag KBRI Beijing, RRC, Agustus 2002.

³⁷ Zainuddin Djafar, Indonesia, ASEAN&Dinamika Asia Timur, Kajian Perspektif Asia Ekonomi-Politik, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2008), hlm. 126.

³⁸ Jurgen Haacke, "The Significance of Beijing's Bilateral Relations: Looking 'Below' the Regional Level in China-ASEAN Ties" dlm Natalia Soebagjo, "Tebar Pesona di Indonesia: Cara Cina Mengambil Hati Indonesia". Merangkul Cina. Gramedia. 2009. Hal 109

keputusan politis yang langsung meningkatkan citra China di Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, keputusan China untuk tidak bereaksi keras dan spontan terhadap berita pemerkosaan para wanita keturunan China pada kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, merupakan sebuah keputusan bijak yang menghargai kedaulatan negara lain³⁹.

Hubungan antara dua negara terus membaik dan berkembang ke arah positif setelah kejatuhan Soeharto. Presiden Abdurrahman Wahid, pada Desember 1999 melakukan kunjungan resmi ke China. Hasilnya adalah penandatanganan *joint communique* dengan Presiden RRC saat itu, Jiang zemin, yang menegaskan pentingnya kerjasama untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan berimbang.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati juga terdapat penandatanganan berbagai nota kesepakatan dalam bidang perdagangan, investasi, kerja sama dalam bidang iptek dan pertahanan serta peningkatan pertukaran sosial budaya. Puncaknya terjadi pada 25 April 2005, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden China, Hu Jintao, menandatangani Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis Indonesia-China. Dalam isinya disebutkan bahwa “kemitraan strategis ini akan berupa hubungan yang tidak memihak dan tidak tertutup yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kedua negara beserta rakyatnya⁴⁰”.

Perjanjian ini merupakan yang satu-satunya perjanjian serupa di seluruh Asia Tenggara. Terdapat beberapa bidang yang dijadikan dasar kerjasama, yaitu: perdagangan internasional, pembangunan infrastruktur, keamanan, militer dan kebudayaan (terutama di bidang turisme dan pengajaran bahasa Mandarin)⁴¹. Penandatanganan deklarasi perjanjian kemitraan ini juga dibarengi dengan penandatanganan MOU mengenai beberapa bidang tersebut di atas. Penandatanganan per-

³⁹ Menlu China saat itu, Tang Jiaxuan, baru mengeluarkan pernyataan pada bulan Agustus 1998 untuk menghukum para pelaku pemerkosaan dan kerusuhan sekaligus melindungi warga negara Indonesia keturunan China. China tidak ingin menimbulkan kesan ikut campur urusan dalam negeri Indonesia ataupun berlebihan membela keturunan China yang bukan warga negara China melainkan warga negara Indonesia.

⁴⁰ Menurut Perdana Menteri China, Wen Jiabao, “Kemitraan Strategis” merupakan gaya baru hubungan antar negara dalam konteks hubungan internasional yang bersifat nonaliansi, nonkonfrontasi, dan tidak memusuhi pihak ketiga manapun.

⁴¹ Indonesia-China Joint Statement, lih. <http://www.indonesia-ottawa.org/information/details.php?type=speech&id=52>. Diunduh 20 Oktober 2010.

janjian ini, dapat dikatakan sebagai klimaks dari hubungan kedua negara dan ditandai sebagai fase baru dalam sejarah hubungan kedua negara.

Sejak tahun 2005 hingga sekarang, hubungan kedua negara semakin erat. Volume perdagangan RI-China pada tahun 2007 naik 31,2% dibandingkan tahun 2006, mencapai US\$ 21,01 milyar dengan nilai ekspor ke China sebesar US 12,61 milyar dan impor US\$ 12, 4 milyar⁴². Investasi China di Indonesia juga mencatat lonjakan yang signifikan. Dalam periode Januari-November 2007, investasi China di luar sektor migas mencapai US\$ 272,3 milyar dan 76 poyek pada tahun 2006. Investasi pengusaha Indonesia di China juga naik dari US\$ 106,85 juta pada tahun 2006 menjadi US\$ 134,41 juta pada tahun 2007.

Dalam bidang kebudayaan, perkembangan hubungan RI-China tidak meningkat sedrastis kerjasama ekonomi dan perdagangan. Skala kerjasama dua negara masih tergolong kecil. Meskipun persetujuan kerja sama di bidang Budaya sudah ditandatangani sejak 1961, namun karena pembekuan hubungan diplomatik dua negara pada tahun 1967, mengakibatkan perkembangan hubungan terhenti dan baru dapat dipulihkan kembali pada tahun 1990. Karenanya, masih banyak bidang yang belum ditangani secara optimal.

Meski demikian, menurut hasil survei opini publik yang dilakukan oleh The Chicago Council on Global Affairs, bekerja sama dengan East Asia Institute of South Korea, masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang positif terhadap *soft power* China⁴³. Survei tersebut menggunakan lima pilar *soft power* sebagai indikator, yaitu *soft power* ekonomi, kultural, sumber daya manusia, diplomasi dan politik. Dari kelima pilar tersebut, pengaruh *soft power* China di bidang kultural adalah yang terbesar. Bahkan lebih besar dibandingkan Amerika Serikat dan Korea selatan. Akan tetapi untuk bidang politik, diplomasi maupun ekonomi, pengaruh *soft power* China di Indonesia belum mampu mengalahkan Jepang⁴⁴. Meski demikian, tampak jelas bahwa China juga memanfaatkan budaya sebagai alat penyebaran *soft power*nya terhadap Indonesia.

⁴² Dikutip dari tulisan Natalia Soebagjo dalam buku "Merangkul China" hal 112 (Sudrajat. "Peluang dan Prospek Kerja sama Investasi, perdagangan dan pariwisata (ITT) RI-China" berita tanggal 11 April 2008 diunduh dari <http://www.deplu.go.id> 10 Agustus 2008)

⁴³ Soft Power in Asia: Results of a 2008 Multinational Survey of Public Opinion oleh Chicago Council on Global Affairs bekerja sama dengan EAI, Christopher B. Whitney sebagai Project Director dan David Shambaugh sebagai Senior Project Consultant.)

⁴⁴ Ibid, hal 115

1.2. Permasalahan Penelitian

Chinese Bridge Competition (汉语桥) adalah kompetisi Bahasa Mandarin yang pertama kali diselenggarakan di Beijing pada tahun 2002. Kompetisi ini merupakan kegiatan tahunan yang memiliki ruang lingkup peserta yang berasal dari negara-negara yang menjadikan Bahasa Mandarin sebagai pelajaran Bahasa Asing pilihan.

Pada tahun 2009, terdapat 58 negara dengan total 201 peserta. Syarat utama kesertaan dalam kompetisi ini adalah calon peserta bukan berasal dari negara yang menggunakan Bahasa Mandarin sebagai bahasa ibu. Dan peserta diutamakan adalah Mahasiswa jurusan Bahasa Mandarin. Dari titik ini, dapat dilihat keistimewaan pertama kompetisi yang memang diperuntukkan hanya bagi para pelajar asing yang berminat dan tertarik pada Bahasa Mandarin.

Kompetisi ini secara resmi diselenggarakan oleh Hanban. Hanban merupakan badan resmi yang didirikan oleh Pemerintah China yang bertugas khusus untuk mengelola dan mengurus perkembangan Budaya dan Bahasa China di lingkup dunia internasional. Masuk dan berada langsung di bawah Departemen Pendidikan China, badan ini menjadi sebuah catatan tersendiri mengenai perhatian khusus yang diberikan pemerintah China dalam perkembangan Budaya dan Bahasa China.

Bila ditelaah lebih lanjut, pembentukan badan ini sesuai dengan strategi pemerintah China yang mengedepankan kebudayaan sebagai ujung tombak pengembangan *soft power* negaranya. Karenanya, penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan kompetisi bahasa lainnya. Karena jelas, *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang diselenggarakan oleh Hanban merupakan salah satu bentuk penyebaran *soft power* yang dilakukan pemerintah China pada masyarakat internasional.

Chinese Bridge Competition (汉语桥) sendiri mengalami perkembangan besar pada tahun 2008, dimana untuk pertama kalinya kompetisi tidak hanya

diperuntukkan bagi para Mahasiswa asing, tetapi juga untuk para pelajar Sekolah Menengah Atas. Dan apabila pada tahun-tahun sebelumnya, para peserta hanya diundang datang ke China untuk mengikuti semi final dan final penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥), maka mulai tahun 2008, beberapa peserta terpilih pada saat seleksi wilayah dipersilahkan untuk mengikuti *Chinese Bridge Summer Camp* yang berlangsung selama tiga minggu pada libur musim panas.

Beberapa perkembangan yang cukup signifikan ini menarik perhatian penulis ketika menemukan fakta bahwa pada akhir tahun 2007, Pemerintah China secara resmi memproklamirkan fokusnya pada pengembangan *soft power*, khususnya dalam bidang kebudayaan. Dan tepat satu tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2008, *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) mengalami perkembangan yang begitu besar.

Bila dikaitkan antara tujuan pengembangan *soft power* China dalam bidang kebudayaan dan tujuan penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) dapat secara eksplisit ditemukan benang merah bahwa penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) adalah sejalan dengan tujuan pemerintah China dalam mengembangkan *soft power*nya. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) diadakan untuk meningkatkan *soft power* China. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, **Bagaimana *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) dapat menjalankan fungsinya sebagai *tools soft power* kebudayaan bagi China di Indonesia? Dan apa saja aktivitas yang dilakukan di dalam *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) dapat merubah dan/atau meningkatkan citra positif peserta kompetisi Indonesia terhadap negara China?**

Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan analisa mengenai:

1. faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah China dalam menjadikan kebudayaan sebagai alat utama pengembangan *soft power*; dan

2. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta selama *Chinese Bridge Competition* (汉语桥).

Dari dua analisa tersebut, diharapkan dapat dibuktikan bahwa kompetisi ini dapat membantu pemerintah China dalam menyebarkan pengaruhnya di dunia internasional, khususnya di Indonesia, dan secara luas dapat dikatakan bahwa China menggunakan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) sebagai media pengembangan *soft power* negaranya.

1.3. Signifikansi Penelitian

Komitmen China dalam pelaksanaan strategi politik luar negerinya melalui metode penyebaran *soft power* secara global telah diakui dunia internasional. Lebih lanjut, Pemerintah China menyatakan titik penting *soft power* China akan dilakukan melalui penyebaran kebudayaan. *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) sebagai sebuah kompetisi Bahasa Mandarin tingkat dunia, dirancang tidak hanya untuk mempertandingkan kemampuan berbahasa Mandarin para peserta dari berbagai negara di seluruh dunia, tapi juga melalui kegiatan memperbandingkan pemahaman dan penguasaan para peserta akan pengetahuan budaya, sejarah, politik dan sastra China.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana *Chinese Bridge Competition* berperan dan berpengaruh dalam peningkatan *soft power* China di dunia, khususnya di Indonesia. Untuk ke depan, penelitian ini diharapkan akan memberi kejelasan tentang pola pengembangan *power* China yang dilakukan melalui *soft power* dalam penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥).

Pembahasan dalam penelitian ini akan terfokus pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Hanban dalam penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang terfokus pada tahun 2008-2010. Tahun 2008 dijadikan

awal penelitian karena pada Kongres partai tahun 2007 Pemerintah China secara resmi mengumumkan komitmennya untuk mengedepankan kebudayaan sebagai *tools soft power* negaranya, dan tahun 2008 adalah tahun pertama penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) setelah keputusan resmi Pemerintah tersebut ditetapkan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka jalan terhadap diskusi dan analisis lebih lanjut mengenai kemungkinan peningkatan *soft power* suatu negara melalui kegiatan kompetisi Bahasa dan Kebudayaan seperti yang dilakukan oleh China melalui *Chinese Bridge Competition* (汉语桥).

1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Tinjauan Pustaka

Referensi mengenai *soft power* dalam jaringan elektronik maupun cetak telah meningkat drastis dari tahun ke tahun. Sejak buku karya Joseph Nye yang berjudul *Soft power: The Means to Success in World Politics* diterbitkan pada tahun 2004, terjadi lonjakan penelitian yang berdasarkan pada subjek tersebut. Sebuah pengukuran sederhana dapat dilihat dari jumlah pencarian yang dilakukan Google pada Desember 2006 mengenai “*soft power*” sebanyak lebih dari 67 juta data ber-bahasa Inggris, jauh meningkat jika dibandingkan pada Agustus 2005 yang hanya berjumlah sekitar 60.000⁴⁵. Tulisan-tulisan mengenai “*soft power*” sendiri kemudian jauh lebih berlimpah lagi dikarenakan pengakuan para pemimpin China tentang pentingnya peranan *soft power* dalam tatanan kebijakan luar negeri negara paling potensial di kawasan Asia tersebut.

Adalah Joseph Nye, ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan konsep *soft power* pada dunia internasional. Pada tahun 1990, Nye mengkaji mengenai bagaimana kepemimpinan Amerika Serikat di dunia didasarkan pada *power* yang dimilikinya. Seseorang tidak akan dapat memimpin jika tidak memiliki *power*. Demikian juga dengan negara. Sebuah negara tidak akan dapat memimpin negara lainnya di dunia jika

⁴⁵ Nye, Joseph. Powers to Lead. New York. 2008

tidak memiliki *power*. Seperti cinta, *power* dapat menguatkan dan mendominasi dalam berbagai konteks yang berbeda. *Power* akan membuat hubungan semakin mudah dijalankan dan mendatangkan kestabilan⁴⁶.

Beberapa studi empiris dapat menunjukkan bahwa pihak yang lebih memiliki *power* dapat mempengaruhi perspektif atau pandangan pihak lain. Disinilah pemahaman Nye akan *soft power* bekerja. *Soft power* diartikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan lebih pada bujukan (*attraction*) daripada paksaan (*coercion*) atau pembayaran (*payments*). *Soft power* berbicara mengenai kemampuan untuk mendapatkan hasil nyata karena pihak lain juga menginginkan apa yang diinginkan oleh kita. *Soft power* lebih dalam menjelaskan mengenai bagaimana mengembangkan pengaruh kepada pihak lain agar pihak tersebut dapat secara sukarela atau bahkan tidak sadar telah memberikan apa yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan.

Dalam tulisan-tulisannya, Nye menyatakan bahwa kemampuan untuk dapat mempengaruhi negara lain dalam kaitannya mengembangkan *soft power* pada negara-negara tersebut didasarkan pada kebudayaan, ideologi dan institusi⁴⁷. Lebih detil, Nye mencatatkan bahwa ada tiga sumber utama dari *soft power* sebuah negara, yaitu: budaya (*culture*), nilai politik (*political value*) dan kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Nye juga menegaskan bahwa *soft power* juga termasuk kemampuan dalam membentuk agenda dan institusi internasional, yang secara nyata dapat terlihat sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Dalam definisi ini, komponen tradisional *power* seperti militer, ekonomi dan kekuatan teknologi akan masuk dalam kategori sumber *hard power*⁴⁸.

Soft power dewasa ini telah menjadi daya tarik dalam menetapkan dasar sistem politik sebuah negara. Nilai-nilai budaya telah menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjelaskan jenis pengaruh yang tidak berbentuk dan menjadi salah satu bagian penting dari negara. Seperti saat ini, ketika penelitian terpusat pada kekuatan negara, selain informasi

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Nye, Joseph. "Soft power". Foreign Policy. 1990

⁴⁸ Li, Minjiang. *Soft power: Nurture not nature*. Maryland. 2009

teknologi, ekonomi, militer, jumlah penduduk dan sumber daya alam yang notabene merupakan sumber-sumber *hard power*, para peneliti tersebut juga dengan jelas mempertimbangkan faktor-faktor *soft power* yang berkembang.

Karena *soft power* lebih banyak muncul dalam bentuk budaya dan pengaruh semangat dalam berbagai lapisan masyarakat, maka *soft power* sendiri tidak terlihat, tidak teraba, tidak dapat ditimbang dan tidak dapat dilihat dalam tempo waktu tertentu⁴⁹. Melalui kabel elektrik, Amerika tidak berhenti memberikan pemahaman mengenai paham kebebasan dan Liberalisme kepada Uni Soviet dan Eropa Timur. Dan hal-hal inilah yang memperkuat pengaruh Amerika Serikat di dunia internasional.

Sebagai perbandingan, digunakan Amerika Serikat yang memiliki *hard power* yang belum dapat ditandingi negara manapun di bumi. Jumlah penduduk dan luas tanah Amerika memberikan kontribusi sebesar 6% pada dunia, namun perkembangan investasi di negara itu memberikan pengaruh pada dunia sebesar 1/3. Meskipun pengeluaran negara dalam belanja bidang pertahanan lebih sedikit 4% daripada total PDB dalam negeri, namun tetap mengalahkan jumlah pengeluaran pertahanan 12 negara lain jika di akumulasikan⁵⁰.

Dalam jangka waktu yang sangat panjang, Amerika berpendapat bahwa *hard power* yang dimiliki negaranya dapat melindungi dan mengamankan Amerika, namun peristiwa 9/11 telah membuktikan bahwa tidak akan bisa hanya mengandalkan *hard power*. Karenanya, Amerika mulai memperkuat kembali citra negara tersebut di negara-negara Timur Tengah melalui diplomasi publik⁵¹. Diplomasi publik sendiri juga merupakan salah satu bentuk dari *soft power*.

Sekalipun Perang Irak, masalah penjara Guantanamo dan penghinaan terhadap Qu'ran dapat terselesaikan dengan baik, namun masyarakat dunia sudah terlanjur tidak puas terhadap Amerika dan hal ini menjadikan *soft power* Amerika di dunia menurun. Dan sekarang, melalui

⁴⁹ Diterjemahkan dari buku Zhongguo Weilai Zouxian: Quji Gaocheng Juece Yu Guojia Zhanlue Buju. Hlm. 190

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Zhongguo Weilai Zouxian: Quji Gaochen Juece yu Guojia Zhanlue Buju. Hlm 190

McDonald, jeans, coca cola, disneyland dan berbagai produk budaya lainnya, Amerika kembali giat untuk meningkatkan *soft power*nya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa produk ekspor terbesar Amerika saat ini bukanlah alat pertanian, alat produksi pabrik, melainkan mengekspor budaya seperti film, program televisi, musik, piranti lunak komputer dan lain-lain⁵². Josef Joffe bahkan berpendapat bahwa pengaruh budaya Amerika jauh melampaui kekuatan ekonomi dan militernya⁵³.

Pentingnya budaya sebagai salah satu alat penyebaran *soft power* di dunia juga diakui oleh Perancis yang mempromosikan budayanya sebagai bagian penting dalam membina hubungan luar negeri. Melalui satelit dan siaran televisi berteknologi, Perancis menyiarkan gambaran dirinya pada dunia luas⁵⁴. Untuk memperkenalkan bahasa dan budaya ke dunia, Perancis mendirikan *Alliance Francaise*, serupa dengan yang dilakukan Jerman melalui *Goethe Institute* dan Inggris dengan *British Council*⁵⁵. Jepang, melalui kartun, musik dan ekspor budayanya, bahkan menyebut slogan "Jepang di akhir abad 20 telah menjadikan budaya sebagai *image* baru negaranya." Korea Selatan sendiri menggunakan *korean wave* untuk menyebarkan budayanya di dunia internasional.

Beragam literatur dalam tulisan-tulisan diatas menunjukkan arti penting *soft power* terutama bagi negara-negara besar di dunia, dan bagaimana negara-negara tersebut menyelenggarakan *soft power*nya. China menetapkan budaya sebagai salah satu *tools* penting dalam penyebaran *soft power* negaranya di dunia, dan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) merupakan salah satu media kegiatan yang dapat

⁵² Ibid. Hlm 194

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Sesuai dengan pernyataan Natalia Soebagio dalam artikel Tebar Pesona di Indonesia: Cara China mengambil hati Indonesia di dalam buku Merangkul China halaman 117, dituliskan bahwa "Institut Konfusius merupakan salah satu alat diplomasi publik China yang didirikan pemerintah China untuk memperkenalkan bahasa dan budaya China ke dunia, seperti apa yang dilakukan Jerman melalui *Goethe Institute*, Perancis dengan *Alliance Francaise*, dan Inggris dengan *British Council*. Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa fungsi *Goethe Institute*, *Alliance Francaise* dan *British Council* bagi negara pendirinya adalah bentuk dari upaya pemerintah negara tersebut memperkenalkan bahasa dan budaya negaranya pada dunia.

dikategorikan memenuhi kualifikasi untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Karena itu menjadi penting untuk menelaah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta selama berlangsungnya kegiatan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥), sehingga dapat ditemukan faktor-faktor yang dapat membuktikan bahwa kompetisi ini membantu pemerintah China dalam menyebarkan pengaruhnya di dunia internasional, khususnya di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** yaitu pendekatan yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap fenomena maupun fakta. Proses penelitian kualitatif lazimnya mengikuti pola induktif dimana penelitian diawali dengan pengamatan terhadap sebuah fenomena atau fakta empiris yang spesifik dan unik yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah generalisasi empiris yang pada akhirnya dapat menghasilkan sebuah teori baru mengenai fenomena atau fakta yang diteliti⁵⁶.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode **studi kasus** (*case study*); menurut Alan Bryman, studi kasus adalah “analisis yang seksama dan intensif terhadap sebuah kasus tunggal.”⁵⁷ Metode ini biasanya mencoba untuk memahami kompleksitas dan sifat khas dari kasus yang diteliti; fokus penelitian adalah antara lain terhadap suatu komunitas, sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu.⁵⁸

Dalam konteks penelitian ini, studi kasus yang akan dilakukan mengikuti definisi Andrew Bennett yaitu sebuah “analisis dari sebuah aspek dari suatu peristiwa sejarah yang didefinisikan dengan baik.”⁵⁹ Menurut Bennett, suatu peristiwa sejarah terdiri dari bermacam-macam variabel bebas (*independent*)

⁵⁶ Alan Bryman, *Social Research Methods* (2nd ed.), New York: Oxford University Press, 2004, h. 16; disarikan oleh penulis.

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid., Hlm. 48-49.

⁵⁹ Andrew Bennett, “Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages”, *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*, Eds. Detlef F. Sprinz & Yael Wolinsky-Nahmias, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004, h. 21; terjemahan oleh penulis.

maupun terikat (*dependent*) sehingga melalui studi kasus seorang peneliti dapat memfokuskan pada aspek-aspek yang menarik baginya.⁶⁰

Data yang digunakan merupakan data-data primer yang diperoleh secara kualitatif dengan menggabungkan data primer dan data sekunder. Data primer berbentuk wawancara mendalam dan terarah dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini, yaitu: Badan Koordinasi Bahasa Mandarin sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia, panitia penyelenggara (Universitas yang ditunjuk sebagai tuan rumah tahunan) dan para peserta *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang berasal dari Indonesia.

Dikarenakan teritori domisili peserta *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang umumnya bermukim di China, maka wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka, e-mail, skype dan via telpon. Narasumber penelitian ini merupakan peserta *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang pernah mengikuti kegiatan pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan periode waktu penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Rentang usia para narasumber berkisar antara 20-24 tahun. Para narasumber dipilih berdasarkan prestasi yang diraih dalam *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang memungkinkan narasumber untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥). Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Ketua Program Bahasa China dan guru pembimbing peserta dari beberapa Universitas yang mengirimkan perwakilannya hingga tahap semifinal dan final.

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, koran, majalan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut diperoleh dari website resmi pemerintah China seperti www.hanban.edu, www.chinese.edu, www.moe.cn. Ada juga materi yang berasal dari perpustakaan, yaitu Perpustakaan FISIP-UI, UPDHI-UI, LKC Bina Nusantara dan SALLC Bina Nusantara.

1.6 Sistematika Penulisan

⁶⁰ Ibid.

Sistematika penulisan diajukan agar penelitian ini dapat tersusun secara teratur dan sistematis. Penyusunan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian atau pembabakan sebagai berikut:

BAB 1 meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Signifikansi penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 Bagian ini akan secara khusus membahas perkembangan negara China di dunia global yang membawa tantangan bagi negara ini untuk terus berinovasi mengembangkan *soft power*, terutama dalam hal budaya. Bagian ini juga akan menjabarkan dasar dan signifikansi kebudayaan ditetapkan sebagai *soft power* China serta *soft power* China di Indonesia.

BAB 3 Bagian ini akan menjabarkan mengenai *Chinese Bridge Competition* (汉语桥), konsep kegiatan dan aspek-aspek yang terdapat di dalam penyelenggaraan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥). Secara khusus pada bagian ini juga akan membahas mengenai respon dan pandangan Indonesia terhadap pelaksanaan *Chinese Bridge Competition* (汉语桥).

BAB 4 merupakan elaborasi mengenai berbagai aspek dalam *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) yang menjadi elemen penyelenggaraan *soft power* China; serta analisa bagaimana *Chinese Bridge Competition* (汉语桥) mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pengembangan *soft power* China di Indonesia.

Bab 5 bagian penutup yang akan menyampaikan kesimpulan akhir dari analisis dan rekomendasi bagi para peneliti ilmu Hubungan Internasional khususnya mereka yang berminat untuk melakukan studi atau analisis lanjut terhadap fokus penelitian yang sama dan/atau serupa maupun bagi para pembuat keputusan (*decision makers*) yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terutama yang berkaitan dengan China.